

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran merupakan permasalahan yang sering terjadi di Indonesia dan sulit untuk ditangani pemerintah pada era modern ini, dikarenakan di Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang banyak, namun lapangan pekerjaan masih belum seimbang. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan dalam kategori angkatan kerja juga disebut pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang akan berdampak pada diri sendiri. Orang yang menganggur akan rugi karena tidak ada pemasukan uang, sedangkan kebutuhan untuk hidup pun akan terus berlanjut. Dalam hal tersebut akan timbul masalah, misalnya akan muncul tindakan kriminal yaitu pencurian, pencopetan akan sering terjadi. Dan banyak pula orang yang bermalas-malasan bekerja dan akhirnya melakukan hal meminta-minta ke orang lain atau bisa disebut pengemis, contohnya meminta-minta dari rumah ke rumah orang. Dan para pengemis merasa enak hanya dengan meminta ke orang lain, karena hasilnya yang lumayan banyak tanpa harus bekerja keras.

Bahkan dalam Islam, Allah SWT sudah menjelaskan untuk umatnya agar bisa bekerja keras, agar bisa berusaha dengan baik dan benar sesuai aturan Allah SWT.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Latin : wa quli'malū fa sayarallāhu 'amalakum wa rasūluḥu wal-mu`minūn,
wa saturaddūna ilā 'ālīmīl-gaibī wasy-syahādātī fa yunabbī`ukum bimā
kuntum ta'malūn

“Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu`min akan melihat pekerjaanmu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah [9]:105)

Hadist dibawah ini yang menjelaskan bahwa kita lebih baik bekerja dengan giat, dan jangan meminta-minta kepada orang lain ,karena itu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah SWT.

“Sungguh pagi-pagi seseorang berangkat, lalu membawa kayu bakar di atas punggungnya, ia bersedekah dengannya dan mendapatkan kecukupan dengannya, sehingga tidak minta-minta kepada orang lain, jauh lebih baik baginya daripada meminta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau menolaknya,” (HR. Muslim dan Turmudzi).

Variabel yang memperngaruhi pengangguran salah satunya ialah pendidikan, pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja. Bahkan pendidikan dapat dijadikan tolak ukur bagi pekerja dalam dunia kerja sesuai dengan keahliannya. Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta bisa dilihat melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka partisipasi sekolah (APS) yaitu perbandingan dari jumlah siswa kelompok dengan usia sekolah tertentu yang sedang sekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan kelompok penduduk pada usia sekolah yang sesuai juga dinyatakan dalam presentase Maka semakin tinggi angka partisipasi sekolah semakin banyak usia sekolah yang sedang sekolah di daerah tertentu. Apabila Angka Partisipasi Sekolah di Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkat seharusnya jumlah angkatan kerja banyak yang memiliki pengetahuan juga kemampuan

keterampilan untuk bekal di lapangan pekerjaan. Dan yang masih menjadi permasalahan ialah banyaknya lulusan sekolah namun lapangan pekerjaan yang masih kurang. Dan permasalahan yang lain adalah kemampuan perusahaan dalam menyerap angkatan kerja juga tidak terlalu banyak, yang menyebabkan ketatnya dalam persaingan pencarian kerja yang menjadi salah satu penyebab terjadinya pengangguran.

Kurangnya pendidikan teknologi juga akan berpengaruh terhadap tenaga kerja, mereka sulit untuk mengoperasikan teknologi dengan baik dan benar, karena itu banyak orang-orang yang hanya menjadi buruh kasar. Mereka hanya mengandalkan fisiknya untuk bekerja misalnya kuli bangunan, pemikul barang, dll. Bahkan jika para buruh kasar ini tidak dibutuhkan lagi, maka nasib mereka akan terancam menjadi pengangguran selamanya.

Tabel 1.1

Persentase Angka Partispasi Sekolah (APS) Pada Usia 13-15 tahun di Provinsi DIY tahun 2012-2019 (%)

Angka Partispasi Sekolah (APS)	
Tahun	Usia 12-15 tahun
2012	98,35
2013	96,79
2014	99,48
2015	99,68
2016	99,62
2017	99,63
2018	99,72
2019	99,56

Sumber : Badan Pusati Statistik

Tabel 1.1 menunjukkan presentase angka partisipasi sekolah pada usia 13-15 tahun di Provinsi DIY pada tahun 2012-2019. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa APS di tahun 2012-2019 mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018 menunjukkan presentase tertinggi selama 8 tahun yaitu sebesar 99,72%. Dan presentase terkecil yaitu tahun 2013 sebesar 96,79%. Apabila presentase angka partisipasi sekolah yang tinggi bisa mendorong berkurangnya tingkat pengangguran karena semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menaikkan standar hidup seseorang, sehingga dapat mendorong kenaikan pendapatan perkappita dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Tabel 1.2

Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota tahun 2015-2019

Kab/Kota	Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kot (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
D.I. Yogyakarta	4.07	5.61	3.02	3.35	3.14
Kulonprogo	3.72	2.85	1.99	1.49	1.80
Bantul	3	3.06	3.12	2.72	3.06
Gunungkidul	2.90	1.97	1.65	2.07	1.92
Sleman	5.37	4.44	3.51	4.40	3.93
Yogyakarta	5.52	2.3	5.08	6.22	4.80

Sumber : Badan Pusat Statistik D.I. Yogyakarta

Berdasar tabel diatas dapat dilihat bahwasannya Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong provinsi yang memiliki tingkat pengangguran terbuka yang rendah secara nasional, pada tahun 2016 memiliki nilai tingkat pengangguran terbuka tertinggi yaitu 5,61%. Dan pada tahun 2017 memiliki nilai sebesar 3,02%, nilai tersebut merupakan nilai tingkat pengangguran

terbuka terendah dari tahun 2015-2019. Terjadinya kenaikan dan penurunan pengangguran di DIY ini seharusnya masih menjadi perhatian dan diperbaiki.

Tabel 1.3

Penduduk Yang Termasuk Angkatan Kerja, Bekerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi Di Pulau Jawa, Agustus 2018-2019

	Angkatan Kerja		Bekerja		TPT (%)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
DKI Jakarta	5.062.229	5.192.351	4.725.738	4.852.949	6,65	6,54
Jawa Barat	22.814.361	23.993.348	20.936.930	22.063.833	8,23	8,04
Jawa Tengah	18.228.952	18.421.193	17.413.869	17.602.917	4,47	4,44
DIY	2.226.284	2.246.194	2.151.252	2.174.712	3,37	3,18
Jawa Timur	21.679.425	21.867.742	20.832.201	21.032.612	3,91	3,82
Banten	5.845.978	6.042.279	5.351.110	5.552.454	8,47	8,11

Sumber : Badan Pusati Statistik

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki nilai paling rendah se pulau Jawa, jumlah angkatan kerja pada tahun 2018 Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki nilai paling rendah dan mengalami peningkatan pada tahun 2019. Dan jumlah pengangguran terbuka dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan yaitu dari 3,37 menjadi 3,18 di tahun 2019. Dan pada tingkat nasional tahun 2019 bulan Agustus, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peringkat ke 5 dari 34 provinsi yaitu sebesar 3,18%. Secara nasional, peringkat Yogyakarta masih tergolong rendah, dan pada peringkat tersebut D.I. Yogyakarta sudah termasuk mengalami penurunan dari yang sebelumnya yaitu sebesar 3,37% pada bulan Agustus 2018. Dan hal tersebut harus terus untuk di tingkatkan, agar tidak terjadi pengangguran yang semakin meningkat. Dan pada Provinsi Banten memiliki nilai tingkat

pengangguran terbuka (TPT) paling tinggi se Jawa yaitu pada Agustus 2018 yaitu 8,47%, tetapi mengalami penurunan pada tahun 2019 yaitu 8,11%. Diharapkan Pemerintah di provinsi Banten memberikan pelatihan juga dampingan kepada masyarakat agar bisa mempunyai pekerjaan dan dapat mengurangi pengangguran.

Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah didefinisikan sebagai hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah juga merupakan faktor yang dapat menaikkan kesejahteraan sosial juga menjadi dorongan bagi para pekerja untuk meningkatkan hasil produksi jika dengan upah yang mencukupi, oleh karena itu Pemerintah menetapkan upah dengan nama upah minimum. Setiap daerah mempunyai ketentuan upah yang berbeda-beda yang berdasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) daerah dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi juga produktivitas pada daerah yang bersangkutan. Upah minimum merupakan upah yang banyak dipakai saat ini, upah minimum merupakan upah pokok terendah bulanan yang juga termasuk tunjangan tetap.

Upah Minimum yang digunakan di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Upah Minimum Provinsi atau UMP, namun saat ini D.I. Yogyakarta memakai Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagai sistem upah dikarenakan guna mengurangi kesenjangan di setiap kabupaten/kota. Upah minimum

kabupaten/kota ialah upah minimum yang berlaku pada daerah Kabupaten/Kota. Penerapan upah minimum yang digunakan pemerintah di suatu daerah akan mempengaruhi jumlah pengangguran dikarenakan tingginya penyediaan juga permintaan pekerja dipengaruhi oleh tingkat upah.

Tabel 1.4

Upah Minimum Kab/Kota di DIY tahun 2016-2019

	2016	2017	2018	2019
Kulonprogo	1268870	1373600	1493250	1613200
Bantul	1297700	1404760	1572150	1649800
Gunungkidul	1235700	1337650	1454200	1571000
Sleman	1338000	1448385	1574550	1701000
Yogyakarta	1452400	1572200	1709150	1848400

Sumber : Badan Pusati Statistik

Dapat dilihat pada tabel 1.4 bahwa UMK di DIY setiap tahun mengalami peningkatan, UMK tertinggi terletak di Kota Yogyakarta dan UMK terendah terletak di Kabupaten Gunungkidul. Dengan adanya peningkatan upah minimum dapat memberikan dampak positif juga negatif bagi tenaga kerja. Dampak positifnya yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhannya, akan tetapi dampak negatifnya yaitu terjadi pengurangan tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya peningkatan UMK di khawatirkan akan terjadi peningkatan pengangguran dikarenakan adanya PHK yang dilakukan perusahaan.

Oleh karena berbagai hal diatas maka penulis melakukan penelitian dan ingin menemukan solusi untuk permasalahan terkait Tingkat Pengangguran Terbuka di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2012-2019 yang dipengaruhi

oleh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan judul :
“ANALISIS DETERMINAN YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti hanya akan membahas pada :

1. Setiap kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu : Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, Sleman, dan Kota Yogyakarta.
2. Variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel dependen, dan variabel independennya adalah Angkatan Kerja, Upah Minimum, dan Tingkat Pendidikan.
3. Penelitian dilakukan pada periode 2012 sampai 2019.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Dengan adanya latar belakang yang telah dijelaskan diatas mengenai pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel Angkatan Kerja terhadap Pengangguran Terbuka di D.I. Yogyakarta di tahun 2012-2019?
2. Bagaimana pengaruh variabel Upah Minimum Kabupaten/Kota terhadap Pengangguran Terbuka di D.I. Yogyakarta di tahun 2012-2019?

3. Bagaimana pengaruh variabel Pendidikan terhadap Pengangguran Terbuka di D.I. Yogyakarta di tahun 2012-2019?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh Angkatan Kerja terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta tahun 2012-2019.
2. Menganalisis pengaruh Upah Minimum kabupaten/kota terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta tahun 2012-2019.
3. Menganalisis pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di D.I. Yogyakarta tahun 2012-2019.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, manfaat yang diharapkan Peneliti dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak yang membaca penelitian ini.
2. Diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penulis yang lainnya yang berkaitan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka, Angkatan Kerja, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Dan Pendidikan.
3. Serta bagi masyarakat umum diharapkan dapat menambah wawasan khususnya yang berkaitan dengan Tingkat Pengangguran yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.